

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Jawa Timur merupakan 'habitat' bagi rumah tangga petani gurem. Populasi rumah tangga petani gurem di Jawa Timur menunjukkan peningkatan sebesar 588.478 rumah tangga dengan rincian 2.815.000 rumah tangga ditahun 1993 meningkat menjadi 3.403.478 rumah tangga ditahun 2003 (BPS, 2013). Dengan jumlah tersebut, Provinsi Jawa Timur menempati urutan teratas sebagai wilayah yang paling banyak dihuni oleh rumah tangga petani gurem (*ibid*).

Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar (BPS, 2013). Rumah tangga petani gurem disebut juga sebagai rumah tangga petani miskin (*peasant*) (Cahyono, 1983). Faktor utama kemiskinan rumah tangga ini adalah luas lahan pertanian yang sempit (Darwis, 2008; *ibid*). Dengan luas lahan yang dikuasainya, rata-rata pendapatan rumah tangga ini hanya sebesar Rp. 81.250,00 hingga Rp. 135.000,00 per bulan (Deptan, 2000, dalam Yustika, 2003). Tentu saja, jumlah pendapatan tersebut masih jauh dari cukup karena berada dibawah ukuran baku pendapatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2009), yaitu sebesar Rp. 600.000,00 per bulan.

Rumah tangga petani gurem tidak hanya ada di penjuru desa Jawa Timur. Namun, di Kota Surabaya yang tidak lain adalah ibukota Jawa Timur, tidak terlalu sulit untuk menemukan keberadaan mereka. Contohnya adalah di Kecamatan

Gunung Anyar. Kecamatan Gunung Anyar merupakan salah satu wilayah di Kota Surabaya yang terletak di timur Kota Surabaya yang berbatasan dengan Kecamatan Rungkut di sebelah utara, Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan, dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo di sebelah barat. Kecamatan Gunung Anyar memiliki luas wilayah 9,20 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 50.919 jiwa (BPS Kota Surabaya, 2012).

Kecamatan Gunung Anyar merupakan salah satu wilayah Kota Surabaya yang memiliki persawahan. Persawahan yang ada dikecamatan tersebut terbentang seluas 57 hektar dan merupakan wilayah persawahan terluas di wilayah timur Kota Surabaya (BLH-KS, 2011).

Gambar 1.1
Persawahan di Kecamatan Gunung Anyar



Sumber: Koleksi Pribadi, 2012

Namun sayang, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya (*ibid*) mengungkapkan bahwa kepemilikan persawahan di Kecamatan Gunung Anyar telah didominasi oleh pengembang-pengembang perumahan. Selain itu, sebagaimana tertulis didalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 03 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, Kecamatan Gunung Anyar bersama dengan Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo,

telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan industri, pendidikan, perumahan, dan konservasi hutan bakau.

Kedua hal tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi rumah tangga petani gurem yang ada di Kecamatan Gunung Anyar. Pertama, konsekuensi dari kepemilikan persawahan yang telah didominasi oleh para pengembang perumahan adalah rumah tangga petani gurem harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menyewa tanah dari para pemilik tanah yang tidak lain adalah para pengembang perumahan. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang petani berinisial G berikut ini:

“Petani di sini itu nyewa semua sawahnya sama PT (sebutan untuk pengembang perumahan) mas, sudah nggak ada lagi yang milik pribadi...”. “Sewa tanah disini harganya empat ratus sampe enam ratus ribu rupiah tiap tahunnya mas... itupun cuma dapet empat ratus sampe lima ratus meter saja luasnya...” lanjutnya.

Penetapan Kecamatan Gunung Anyar sebagai wilayah pengembangan industri, pendidikan, perumahan, dan konservasi hutan bakau, juga menimbulkan akibat yang merugikan bagi rumah tangga-rumah tangga petani, khususnya rumah tangga petani gurem di Kecamatan Gunung Anyar. Kerugian yang diderita oleh rumah tangga petani gurem adalah semakin besarnya beban pengeluaran rumah tangga karena kebutuhan untuk bercocok tanam, seperti: pupuk, bibit, dan pestisida, harus mereka sediakan sendiri tanpa ada bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya. Seperti dituturkan oleh salah seorang petani berinisial K berikut ini:

“Untuk bibit sama obat-obatan mas, saya beli sendiri mas... harga bibit padi per sepuluh kilo itu seratus dua puluh lima ribu rupiah. Kalo obat-obatannya sekitar dua ratus lima puluh ribu mas...”

Besarnya beban pengeluaran rumah tangga daripada pendapatan yang mereka terima memaksa para petani gurem menempuh beragam cara agar tetap mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, diantaranya adalah bekerja diluar waktu bertani (*off farm*) atau memanipulasi kehidupan kesehariannya (Septiarti, dkk., 1995). Selain beraktivitas dilahan pertanian, para petani gurem terkadang harus bekerja diluar waktu bertani (*off farm*). Namun sayang, mereka hanya mampu mengakses pekerjaan yang tergolong kedalam sektor informal dan berpenghasilan rendah, seperti: buruh serabutan, penjaga toko, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya (*ibid*; Darwis & Nurmanaf, 2002; Yustika, 2003). Bahkan, ada juga yang sampai melacurkan anak-anak mereka demi mendapatkan segenggam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (ILO, 2004).

Rendahnya pendapatan rumah tangga petani gurem serta alternatif pekerjaan yang tidak menawarkan peningkatan pendapatan secara signifikan berdampak pada munculnya tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi yang melanda rumah tangga petani gurem, pada titik tertentu, dapat mereduksi kepuasan pernikahan melalui konflik dan merebaknya gejala emosi negatif diantara pasangan (Elder Jr., dkk., 1992; Robila & Krishnakumar, 2005; Aytac & Rankin, 2009). Padahal, kepuasan pernikahan merupakan hal yang paling fundamental, tidak hanya bagi pernikahan, namun juga bagi individu yang terikat didalamnya.

I.2. Identifikasi Masalah Penelitian

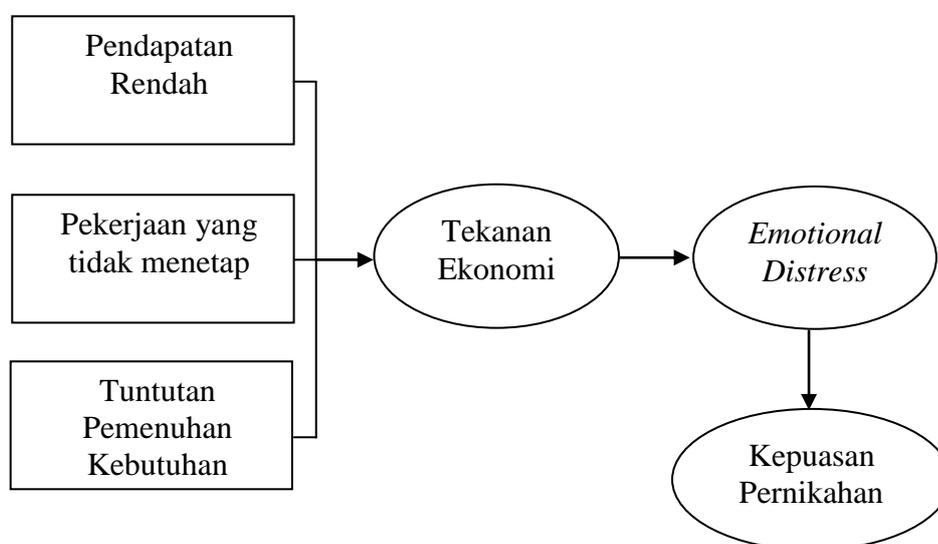
Rumah tangga petani gurem merupakan rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan. Sebagaimana diketahui, rata-rata pendapatan rumah tangga petani gurem adalah sebesar Rp. 81.250, 00 hingga Rp. 135.000,00 perbulan (Deptan, 2000, dalam Yustika, 2003). Jumlah pendapatan ini tergolong rendah daripada standar pendapatan Badan Percepatan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2009) yaitu sebesar Rp. 600.000,00 perbulan. Rendahnya pendapatan yang dimiliki oleh rumah tangga petani gurem tidak dapat dipisahkan dari sempitnya luas lahan yang dikuasai (Darwis, 2008; Cahyono, 1983). Dan, untuk menopang pendapatan rumah tangga, tidak jarang para petani gurem ini harus mencari pekerjaan diluar pertanian, namun jenis-jenis pekerjaan yang tersedia bagi mereka adalah pekerjaan disektor informal dan berpendapatan rendah, seperti: kuli bangunan, buruh serabutan, pembantu rumah tangga, bahkan mereka tak segan untuk melacurkan keturunan mereka (Septiarti, dkk., 1995; Darwis & Nurmanaf, 2002; Yustika, 2003; ILO, 2004).

Rendahnya pendapatan, alternatif pekerjaan yang hanya menawarkan penghasilan rendah, dan pemenuhan kebutuhan diri serta anggota keluarga yang tidak pernah surut, dapat memberikan konsekuensi negatif bagi rumah tangga petani gurem. Merujuk pada *family stress model* (Conger, dkk., 1990; dalam Aytac & Rankin, 2009), ketiga hal tersebut mendorong munculnya tekanan ekonomi pada rumah tangga petani gurem. Tekanan ekonomi adalah perasaan tertekan yang dirasakan oleh seseorang karena pendapatan rumah tangganya tidak

mampu mencukupi berbagai kebutuhan diri maupun anggota rumah tangga yang lain (Elder Jr., dkk., 1992).

Tekanan ekonomi pada titik tertentu dapat menimbulkan gejala emosi negatif (*distress*) yang pada akhirnya memiliki dampak negatif pada interaksi pasangan, seperti: mengkritik pasangan dengan frekuensi yang cukup sering dan menyakitkan, melecehkan harga diri pasangan, dan seringkali berselisih mengenai alokasi pendapatan atau kegiatan rekreasi dimana hal-hal tersebut dapat memicu konflik dengan pasangan (Elder Jr., dkk., 1992; Hill, 1998; Gudmunson, dkk., 2007; Lestari, 2012). Pada kondisi rumah tangga yang tidak lagi memberikan kenyamanan, menurut Gudmunson dan kawan-kawan (*ibid*), kelekatan diantara pasangan akan menjadi luntur, menimbulkan keterasingan, dan pada akhirnya, kepuasan pernikahan berada dititik nadir (Elder Jr., dkk., 1992; Robila & Krishnakumar, 2005; Aytaç & Rankin, 2009).

Gambar 1.2.
Family Stress Model



Kepuasan pernikahan menjadi hal yang paling fundamental, tidak hanya bagi pernikahan, melainkan terkait secara langsung dengan individu yang terikat didalam pernikahan. Bagi individu, kepuasan pernikahan dapat menghantarkan seseorang pada tercapainya kepuasan hidup dan kesejahteraan (*well-being*) (Fincham & Beach, 2010). Sedangkan bagi pernikahan, kepuasan pernikahan merupakan prediktor bagi kelanggengan pernikahan (Gottman, 1993).

Kepuasan pernikahan adalah sikap seseorang terhadap pasangan atau hubungan pernikahannya (Roach, dkk., 1981; Bradbury, dkk., 2000). Secara spesifik, Bradbury dan kawan-kawan (2000) menafsirkan kepuasan pernikahan sebagai suatu bentuk evaluasi seseorang terhadap pasangan atau hubungan pernikahannya. Terdapat beragam aspek yang dapat menjadi objek evaluasi seseorang terhadap pasangan maupun hubungan pernikahannya, seperti: interaksi yang terjalin dengan pasangan, kehadiran anak, ekonomi, hubungan seksual, usia, kepribadian pasangan, serta dukungan sosial (*ibid*; Johnson, dkk., 1986, dalam Pittman & Lloyd, 1988; Levenson, dkk., 1993, 1994; Baxter, 1986, dalam Cutrona, 1996; Bryant & Conger, 1999, dalam Delamater, 2003; Papp, dkk., 2009).

Seseorang yang tidak puas terhadap pasangan atau pernikahannya akan memunculkan perilaku negatif yang dapat mengancam kesehatannya (menjadi pecandu minuman beralkohol, perokok berat, menjadi pengguna narkotika dan lain sebagainya), dibayang-bayangi oleh rasa cemas akan masa depan hubungannya, merasa terisolasi dengan lingkungan sekitarnya, selalu memandang negatif pasangannya, terus menerus menyalahkan pasangan atas hal-hal negatif

yang terjadi didalam pernikahannya, terobsesi pada perceraian, dan depresi (Coyne & DeLongis, 1986; Downey & Feldman, 1996; Fincham, dkk., 2000; Kiecolt-Glaser & Newton, 2001; Whisman, dkk., 2004).

Hal yang sebaliknya terjadi pada seseorang yang puas terhadap pasangan atau hubungan pernikahannya. Seseorang yang puas terhadap pasangan atau hubungan pernikahannya akan sangat menikmati interaksi yang terjalin dengan pasangannya dan memandang aktivitas tersebut sebagai aktivitas yang sangat menyenangkan (Levenson & Gottman, 1985). Selain itu, seseorang yang puas terhadap pasangan atau pernikahannya akan saling memberikan dukungan satu sama lain (Dehle & Landers, 2005).

Rumah tangga dengan latar belakang pendapatan rendah, seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, sangatlah rentan terhadap ketidakpuasan pernikahan. Namun hal tersebut nampaknya tidak berlaku secara umum. Menurut Lestari (2012), tidak sedikit pasangan dengan latar belakang rumah tangga berpendapatan rendah yang puas terhadap pernikahan mereka. Hal ini, menurut Bradbury dan kawan-kawan (2000) serta beberapa penulis lain, terkait dengan adanya ketahanan didalam rumah tangga, yang salah satu manifestasinya adalah adanya dukungan sosial didalam rumah tangga (Bryant dan Conger, 1999, dalam Delamater, 2003; Dehle & Landers, 2005; McCubbin, dkk., 1980, dalam Pittman & Lloyd, 1988). Dukungan sosial adalah pertukaran sumber daya diantara dua orang, yaitu seseorang yang bertindak sebagai penyedia bantuan dengan seseorang yang bertindak sebagai penerima bantuan, dimana pertukaran sumber daya

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (*well being*) penerima dukungan (Shumaker dan Brownell, 1984, dalam Duffy & Wong, 2003).

Dukungan sosial sebagai wujud dari ketahanan keluarga, dapat bermanfaat sebagai *coping* seseorang terhadap tekanan ekonomi dan gejolak emosi negatif yang mengiringinya (Bolger, dkk., dalam Bradbury, dkk., 2000; Robila & Krishnakumar, 2005; Cutrona, 1996). House (1976, dalam Smet, 1994), mengejawantahkan dukungan sosial menjadi empat macam bentuk, yaitu: dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan penghargaan, dan dukungan informasi.

Dukungan emosional merujuk pada tindakan seseorang yang mendengarkan penuh simpati curahan hati seseorang, memberikan perhatian kepada orang lain, dan lain sebagainya. Dukungan instrumental merujuk pada tindakan seseorang yang memberikan atau meminjamkan sesuatu secara konkrit, seperti: uang, makanan, alat transportasi, dan lain sebagainya. Dukungan penghargaan merujuk pada tindakan seseorang yang menunjukkan rasa hormat pada kepala rumah tangga, orang yang lebih tua, dan sebagainya. Persetujuan terhadap gagasan orang lain termasuk kedalam dukungan ini. Terakhir, adalah dukungan informasi. Dukungan informasi merujuk pada pemberian saran atau nasihat kepada seseorang, memberikan petunjuk tentang mengerjakan sesuatu kepada orang lain, dan lain sebagainya.

Dukungan sosial dapat diperoleh dari siapa saja. Namun, didalam konteks rumah tangga, setiap anggota rumah tangga merupakan sumber dukungan sosial yang utama (Dehle & Landers, 2005) dan dukungan sosial yang berasal dari

anggota rumah tangga, dapat memberikan dampak positif secara langsung bagi kepuasan pernikahan daripada sumber dukungan sosial yang berada diluar rumah tangga (*ibid*; Schramm & Harris, 2010). Terkait dengan hal itu, kajian yang dilakukan oleh Vinokur, Price, dan Caplan (1996) dan diikuti oleh 815 orang pencari kerja dan berpasangan, menyimpulkan bahwa dukungan sosial dari pasangan berhubungan secara positif dengan kepuasan pernikahan. Artinya, jika didalam rumah tangga frekuensi hadirnya dukungan sosial rendah, maka akan mengakibatkan rendahnya kepuasan pernikahan dan begitu juga dengan sebaliknya.

Namun, pertanyaannya adalah apakah benar bahwa kepuasan pernikahan yang terdapat didalam rumah tangga berpendapatan rendah terkait dengan dukungan sosial? Penulis tidak mengetahui jawabannya secara pasti. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis mencoba untuk memverifikasi kesimpulan didalam kajian Vinokur, Price, dan Caplan (*ibid*) tersebut.

I.3. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Kepuasan pernikahan.

Kepuasan pernikahan adalah sikap seseorang terhadap pasangan atau hubungan pernikahannya (Bradbury, dkk., 2000).

2. Dukungan sosial

Dukungan sosial adalah pertukaran sumber daya diantara dua orang, yaitu seseorang yang bertindak sebagai penyedia bantuan

dengan seseorang yang bertindak sebagai penerima bantuan, dimana pertukaran sumber daya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (*well being*) penerima dukungan (Shumaker & Brownell, 1984, dalam Duffy & Wong, 2003).

3. Rumah tangga petani gurem

Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar (BPS, 2013).

I.4. Rumusan Masalah Penelitian

Didalam penelitian ini, terdapat satu rumusan masalah yang akan dicari jawabannya, yaitu: Apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan kepuasan pernikahan?

I.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi hubungan antara dukungan sosial dengan kepuasan pernikahan.

I.6. Manfaat Penelitian

I.6.1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah pengembangan keilmuan psikologi, khususnya psikologi sosial terkait dengan hubungan diantara kedua variabel. Selain itu, berdasarkan tujuan dari

penelitian ini, penulis berharap bahwa melalui hasil penelitian ini, dapat semakin memperkuat kedudukan variabel dukungan sosial sebagai faktor kepuasan pernikahan.

I.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wawasan mengenai peranan dukungan sosial terhadap kepuasan pernikahan bagi setiap rumah tangga yang ada di Kota Surabaya.